



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK ISKANDAR MUDA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI SANTOSO SYARIF**
2. Jabatan : **DIREKTUR UTAMA**
3. NHK : **153418**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 38.650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000.000
2. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah Seluas 214 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/66 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
5. Tanah Seluas 796 m2 di KAB / KOTA INDRAMAYU, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 32 m2/32 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 788 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000.000
9. Tanah Seluas 1010 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 563.000.000

1. MOTOR, YAMAHA VEGA R SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



2. MOBIL, MAZDA SEDAN Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER MPV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 282.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.824.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.850.383.025
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	45.887.883.025
III. HUTANG	Rp.	1.136.395.184
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	44.751.487.841

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.